



## **Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik**

**Deby Novalia Gultom<sup>1</sup> Etika Khairina<sup>2</sup> Lubna Salsabila<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Indonesia  
pb201010035@upbatam.ac.id

Received : March 5, 2024; Accepted : Apr 20, 2024  
DOI 10.25299/jiap.2024.16516

### **Abstract**

*E-Government has become central to the transformation of public administration, offering various possibilities to improve the efficiency and effectiveness of government services. This analysis investigates how the implementation of e-government affects public administration from the perspective of operational efficiency and achievement of public service objectives. In addition, E-government is the vanguard of efforts to provide information and services to citizens, businesses, employees and government units, and other organizational sectors. This study adopts a qualitative approach where the sources collected come from journals, books. The results show that the efficiency and effectiveness of e-Government in public administration related to the application of information technology has a significant positive impact. E-Government is also able to increase efficiency in the delivery of public services by cutting bureaucracy and speeding up administrative processes. Simultaneously, the effectiveness of e-Government is reflected in faster responses to citizen needs, enhanced transparency, and increased citizen participation in public decision-making.*

**Key Words :** E-Government, Public Administration, Society.

### **Abstrak**

E-Government telah menjadi pusat transformasi administrasi publik, menawarkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Analisis ini menyelidiki bagaimana implementasi e-government memengaruhi administrasi publik dari perspektif efisiensi operasional dan pencapaian tujuan pelayanan masyarakat. Selain itu, E-government adalah garda depan dari upaya untuk menyediakan informasi dan pelayanan kepada warga negara, bisnis, pegawai dan unit pemerintahan, serta sector organisasi lainnya. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang dimana sumber-sumber yang dikumpulkan berasal dari jurnal-jurnal, buku. Hasil menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas e-Government dalam administrasi publik terkait penerapan teknologi informasi membawa dampak positif yang signifikan. E-Government juga mampu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan memangkas birokrasi dan mempercepat proses administratif. Secara bersamaan, efektivitas e-Government tercermin dalam respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat, transparansi yang ditingkatkan, dan peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik.

**Key Words :** E-Government, Administrasi Publik, Masyarakat.

## Pendahuluan

Globalisasi adalah hal yang tak terhindarkan. Baik kita setuju atau tidak, globalisasi telah meresap ke setiap aspek kehidupan bagi sebagian besar manusia di seluruh dunia. Perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi, informasi, komputasi, dan transportasi telah menciptakan situasi di mana batasan-batasan yang sebelumnya membatasi interaksi antar individu, bangsa, dan negara kini semakin berkurang signifikansinya. Teknologi yang semakin maju telah meningkatkan intensitas dan frekuensi interaksi tersebut dengan kecepatan yang meningkat secara dramatis dan biaya yang semakin efisien (Widodo, 2016). Dampaknya terasa luas, memengaruhi bidang politik, sosial-budaya, dan ekonomi baik secara global maupun lokal. Contohnya, dalam politik internasional, tragedi kemanusiaan di suatu tempat dapat segera memicu respons empati dan kemarahan secara global di berbagai penjuru dunia (Sumardi & Mukhlis, 2021).

Di bidang budaya, terjadi penetrasi budaya serta perubahan gaya hidup masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi memungkinkan produksi barang dan jasa di berbagai belahan dunia asalkan memenuhi standar teknis dan ekonomis, serta dapat dijual ke manapun dengan harga yang optimal. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap organisasi, baik yang berfokus pada profit di dunia bisnis maupun yang berorientasi pada nonprofit di ranah sosial, tanpa mempertimbangkan besarnya investasi yang diperlukan (Nuridin, 2021).

Pemimpin organisasi merasa dilema terkait investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Mereka menyadari

perluinya meningkatkan sistem informasi organisasi dengan dukungan teknologi tersebut (Jalma et al., 2019). Dalam lingkungan global yang kompetitif, memiliki infrastruktur TI yang maju menjadi krusial untuk bersaing dan memberikan layanan yang superior kepada pelanggan. Perkembangan TI telah memaksa perubahan dalam pendekatan dan pelaksanaan kegiatan di semua sektor, termasuk pemerintahan.

Keterlibatan aktif dalam revolusi informasi, komunikasi, dan teknologi akan menentukan arah masa depan kesejahteraan bangsa. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya terbatas pada industri dan perdagangan, melainkan juga merambah ke sektor-sektor seperti pertahanan, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan sosial (Izzah & Sugandha, 2021).

Penggunaan teknologi ini memberikan banyak keuntungan dibandingkan sistem manual dan tradisional. Oleh karena itu, banyak negara di seluruh dunia telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatur manajemen sistem pemerintahannya. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah menghadirkan perubahan yang signifikan bagi sektor swasta yang telah mengadopsi internet sebagai media komunikasi, seperti dalam e-Commerce. Dampaknya sangat besar, dan membuat sektor publik yang masih menggunakan cara konvensional dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya semakin tertinggal. Hal ini mendorong sektor publik untuk mengembangkan e-Government (Heriyanto, 2022). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan pada strategi yang komprehensif dalam menerapkan e-Government dalam administrasi publik. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih

dalam tentang manfaat e-Government dalam tiga dimensi yang berbeda, yaitu ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa implementasi e-Government bukan hanya sekadar alat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dan positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan yang komprehensif yang diusulkan dalam penelitian ini, yang mencakup integrasi sistem yang efisien dan berkelanjutan, juga menambah nilai tambah dalam pemahaman kita tentang bagaimana e-Government dapat berhasil diterapkan dalam konteks administrasi publik.

### **Tinjauan Pustaka E-Government**

Teori ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini membahas bagaimana E-Government dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat (Habibullah, 2020). E-Government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kapabilitas untuk mengubah relasi dengan penduduk, perusahaan, dan unit lain dari entitas pemerintahan (Jalma et al., 2019). E-government sebagaimana disampaikan oleh Forman dalam Dwiyanto (2022) juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan.

### **Efisiensi Administrasi Publik**

Efisiensi adalah indikator yang menggambarkan seberapa efektif sumber daya suatu organisasi digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Irwandy, 2019). Teori efisiensi menyatakan bahwa suatu organisasi dianggap efisien jika output yang dicapai sebenarnya sebanding dengan output yang diharapkan. Fokus dari teori ini adalah meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi publik. Konsep-konsep seperti penggunaan sumber daya yang optimal, pengelolaan birokrasi yang efektif, dan peningkatan produktivitas menjadi bagian dari teori ini (Barker et al., 2020).

### **Efektivitas Pelayanan Publik**

Efektivitas didefinisikan sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya (Purwanti, 2022). Seperti yang dipaparkan oleh Argris dalam (Purwanti, 2022) efektivitas organisasi juga dapat diartikan sebagai keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Teori ini menyoroti efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini melibatkan analisis tentang sejauh mana pelayanan yang disediakan oleh e-Government dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seberapa cepat, responsif, dan mudah diaksesnya (Habibullah, 2020).

### **Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Habiburrahman & Nabila, 2022). Untuk dapat menjadi informasi yang berguna maka didukung dengan 3 komponen utama, yaitu tepat kepada orangnya atau relevan, tepat pada waktunya dan dan tepat keakurasiannya (Hastutik et al., 2022). Teori ini berfokus pada pengembangan, implementasi, dan

pengelolaan sistem informasi. Dalam konteks e-Government, teori ini mempertimbangkan bagaimana sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik (Jalma et al., 2019).

## Metode

Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang cocok untuk mendalami analisis efisiensi dan efektivitas e-Government dalam administrasi publik. Langkah-langkah penelitian kualitatif meliputi (Pahleviannur et al., 2022):

1. Membangun kerangka konseptual, dalam penelitian ini kerangka konsep digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada di bidang e-government. Dengan membangun hubungan antara konsep-konsep yang ada, kerangka konsep dapat membantu memperluas pengetahuan dalam bidang tersebut.
2. Merumuskan permasalahan, melibatkan identifikasi dan pembatasan topik penelitian yang akan diteliti, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang akan dianalisis terkait efisiensi dan efektivitas e-government dalam administrasi publik
3. Pemilihan sampel dan pembatasan penelitian, yaitu memilih partisipan atau kasus yang relevan dengan topik penelitian dan mampu memberikan wawasan yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Studi ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, pengguna layanan e-Government, dan ahli teknologi informasi.

4. Instrumentasi, mengacu pada pengembangan dan penggunaan alat atau teknik tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data
5. Pengumpulan data, melibatkan proses yang beragam untuk mengumpulkan informasi yang mendalam, deskriptif, dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan menggali pengalaman dan pandangan langsung dari pihak terlibat untuk memahami kelebihan dan kekurangan sistem yang ada. Wawancara mendalam akan difokuskan pada pengalaman mereka dalam menggunakan layanan e-Government, persepsi mereka terhadap keefektifan layanan, serta kendala atau hambatan yang mereka alami dalam mengakses atau menggunakan sistem tersebut.
6. Analisis data, proses mendalam untuk memahami, menafsirkan, dan menyusun makna dari data kualitatif yang dikumpulkan.
7. Pengujian kesimpulan, pengujian kesimpulan melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan validitas kesimpulan atau temuan yang dihasilkan dari analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan observasi langsung terhadap sistem e-Government serta dokumen-dokumen terkait akan digunakan untuk memperoleh secara langsung gambaran komprehensif (Sumardi & Mukhlis, 2021). Sumber data yang berhasil penulis temukan ialah dari beberapa buku dan juga jurnal-jurnal pendukung yang berkaitan secara langsung dengan analisis efisiensi dan efektivitas e-Government dalam administrasi publik.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Dari analisis data yang sudah diperoleh dari studi literatur dan narasumber, dapat dijelaskan bahwa era digital membawa perubahan fundamental dari cara-cara konvensional di sektor administrasi publik. Salah satu penerapan digital teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik adalah e-Government. Hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati layanan publik tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Beberapa layanan publik yang diselenggarakan melalui e-Government diantaranya (Sepriano et al., 2023):

1. Pendaftaran penduduk  
Masyarakat dapat melakukan pendaftaran kependudukan secara online, mengajukan perubahan data atau memperpanjang dokumen identitas tanpa harus mengunjungi kantor catatan sipil
2. Perizinan  
Proses pengajuan perizinan untuk usaha atau kegiatan tertentu dapat dilakukan secara online sehingga mempercepat proses dan mengurangi birokrasi
3. Pembayaran Pajak  
Masyarakat dapat membayar pajak melalui platform online, sehingga lebih praktis dan mengurangi antrian di kantor pajak
4. Pelayanan Kesehatan  
E-Government memfasilitasi pendaftaran dan janji temu di rumah sakit atau klik melalui aplikasi online sehingga memudahkan pasien untuk mengakses layanan medis.

Konsep efektivitas administrasi publik dalam e-Government menekankan bahwa tercapainya tujuan-tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan

administrasi public secara digital. Dari hasil studi literatur dan wawancara narasumber bahwa e-government memberikan aksesibilitas yang lebih besar terhadap layanan administrasi publik bagi warga negara. Adanya e-Government menunjukkan otomatisasi proses, pengurangan birokrasi, dan peningkatan produktivitas, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan waktu yang signifikan. Selain itu, adanya layanan administrasi publik mampu menyediakan kebutuhan masyarakat sehingga transaksi dengan pemerintah dapat dilakukan dengan mudah.

Efisiensi administrasi publik dalam e-Government menyoroti bahwa pelayanan akan menjadi lebih efisien jika birokrasi pelayanan dapat memberikan *input* seperti biaya dan waktu pelayanan yang lebih ringan bagi masyarakat. Di sisi lain, dari perspektif *output* pelayanan, idealnya birokrasi dapat menyediakan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dalam hal biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input digunakan untuk mengevaluasi seberapa mudah akses publik terhadap sistem pelayanan yang disediakan. Akses publik terhadap pelayanan dianggap efisien ketika mereka memiliki jaminan atau kepastian terkait biaya pelayanan. Sementara itu, efisiensi pelayanan dari sisi output digunakan untuk menilai pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa memaksa pihak publik untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pelayanan tersebut.

### Pembahasan

E-Government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kapabilitas untuk mengubah relasi dengan penduduk, perusahaan, dan unit lain dari entitas pemerintahan (Jalma et al., 2019). Teknologi yang diterapkan ini dapat

berperan dalam berbagai bidang seperti meningkatkan pelayanan kepada warga negara, memperbaiki keterlibatan dengan sektor bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau mengoptimalkan manajemen pemerintahan (Nurdin, 2021). Implikasi dari penerapan ini termasuk pengurangan kasus korupsi, peningkatan transparansi, dan/atau peningkatan kenyamanan, serta peningkatan pendapatan negara, dan/atau pengurangan biaya (Kristianto & Findawati, 2022).

E-Government merupakan salah satu aspek teknologi informasi yang berperan signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebagai respons terhadap perkembangan global teknologi informasi, hal ini memotivasi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem digital yang mendukung juga pelaksanaan pemerintahan di masa depan. Sebelumnya, Inpres Nomor 03 Tahun 2003 telah dikeluarkan untuk mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang menggarisbawahi komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan e-Government (Jalma et al., 2019).

Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan e-Government adalah untuk menciptakan *customer online* dan bukan *in line* (Lestari et al., 2021). Selain itu e-Government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang

sederhana, murah dan efektif (Sumardi & Mukhlis, 2021).

Analisis efisiensi dan efektivitas e-Government dalam administrasi publik menjadi krusial dalam mengevaluasi pengaruh teknologi informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan modern. Efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan dari implementasi e-Government tercapai (Heriyanto, 2022). Secara efisiensi, e-Government dapat memangkas birokrasi dan mengurangi waktu serta biaya dalam penyelenggaraan layanan publik. Automatisasi proses administratif dapat mengurangi beban kerja petugas dan mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, proses pengajuan dokumen secara online mengurangi antrian dan waktu tunggu, menghasilkan penghematan waktu bagi pengguna layanan (Widodo, 2016).

Dari segi efektivitas, e-Government juga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi data dan informasi yang disediakan secara online memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah dengan lebih mudah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat ditingkatkan melalui platform e-partisipasi, memungkinkan warga untuk tetap memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat (Sumardi & Mukhlis, 2021).

Namun, ada tantangan yang perlu diatasi. Implementasi e-Government memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi informasi dan serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu,

keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi ini, karena risiko kebocoran data atau serangan cyber dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini (Izzah & Sugandha, 2021).

Pada akhirnya, analisis efisiensi dan efektivitas e-Government dalam administrasi publik menekankan pentingnya strategi yang komprehensif. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, integrasi sistem yang efisien, serta keberlanjutan investasi dan pengembangan teknologi dan SDM akan menjadi kunci dalam mencapai manfaat maksimal dari e-Government dalam meningkatkan layanan publik (Wardiningsih, 2019).

Selain itu, terdapat 3 (tiga) perspektif dalam memahami keuntungan dari penerapan e-government, yaitu: (1) Dimensi ekonomi (Lestari et al., 2021). Dalam konteks ekonomi, manfaat e-government mencakup pengurangan biaya transaksi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, perluasan dan peningkatan mutu layanan yang disediakan, peningkatan kemampuan respons terhadap masalah-masalah terkait kemiskinan, serta peningkatan pendapatan; (2) Dimensi sosial. Secara sosial, keuntungan e-government bervariasi dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih akurat terhadap layanan pemerintah, peningkatan kemampuan dalam menyediakan keamanan dan keselamatan (Lestari et al., 2021). Di banyak kasus, manfaat-manfaat ini dapat dinilai dalam dimensi politik dan diukur dalam konteks keuangan; dan (3) Dimensi pemerintahan. Dalam segi pemerintahan, keuntungan e-government mencakup meningkatnya pencapaian *good governance* melalui peningkatan dalam transparansi,

akuntabilitas, dan demokratisasi jika dibandingkan dengan pemerintahan tradisional. E-government juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat, memperkokoh sistem demokrasi yang sudah ada (Kristianto & Findawati, 2022).

## Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa Dalam analisis efisiensi dan efektivitas e-Government dalam administrasi publik, terkait penerapan teknologi informasi membawa dampak positif yang signifikan. E-Government juga mampu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan memangkas birokrasi dan mempercepat proses administratif. Secara bersamaan, efektivitas e-Government tercermin dalam respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat, transparansi yang ditingkatkan, dan peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik.

Meskipun demikian juga menjadi tantangan besar seperti kebutuhan investasi yang besar, keamanan data, dan pembaruan sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kesuksesan implementasi dari e-Government memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknologi, keamanan, regulasi, dan keterlibatan masyarakat guna memastikan pemanfaatan teknologi informasi yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## Daftar Pustaka

Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (2020). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme*, 54–68.

- Habibullah, A. (2020). *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*. 23(c), 187–195.
- Habiburrahman, & Nabila, J. (2022). *PERPUSTAKAAN DIGITAL Pengembangan Repository Sebagai Sarana Preservasi Digital*. Pascal Books.
- Hastutik, S., Yulistiyono, A., Nurofik, A., Hertati, L., & WIyono, D. (2022). *KONSEP DASAR SISTEM INFROMASI MANAJEMEN*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E – Government Dalam Pelayanan Publik. *Journal of Public Administration*, 4(2), 67–75.
- Irwandy. (2019). *Efisiensi dan Produktifitas Rumah Sakit: Teori dan Aplikasi Pengukuran dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*. Social Politic Genius.
- Izzah, A. N. E., & Sugandha, W. (2021). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52836>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kristianto, D., & Findawati, Y. (2022). Perancangan dan Analisis Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebagai Pengembangan E-government Di Kecamatan Krembung. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 1693–1704.
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., Tresiana, N., & Lampung, U. (2021). Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) in the Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 212–224.
- Nurdin, A. H. M. (2021). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1–17.
- Pahleviannur, M. R., Edy, E., Lisya, M., Sinthania, D., & Alam, D. S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Azka Pustaka.
- Purwanti, D. (2022). *EFEKTIVITAS PERUBAHAN KEBIJAKAN*. Azka Pustaka.
- Sepriano, Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, & Afiyah, S. (2023). *TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK MENGHADAPI ERA DIGITAL*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sumardi, N. A., & Mukhlis, S. (2021). Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia. *Journal of Government Insight*, 1(2), 84–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/jgi.v1i2.308>
- Wardiningsih, S. (2019). Perkembangan Teknologi Dan Sistem Informasi Untuk Peningkatan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 69–78.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*

*Administrasi Publik*, 2(4), 227–235.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15>